

## CARICA DAN BAYANG-BAYANG NEOLIBERALISME DI DIENG

*Dhimas Unggul Laksita & Nur Rosyid*

### ABSTRAK

*Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji kontradiksi-kontradiksi pengembangan produksi komoditas pertanian, yaitu kentang dan carica. Penelitian dilakukan di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Produksi kentang, sebagai komoditas pokok petani setempat, menghadapi beberapa permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, modal, dan ekologi. Dalam perspektif ekologi politik, model produksi, kondisi ekologis, dan intervensi politik atas ekologi berada pada hubungan yang dialektis. Di samping itu, saya mencoba mengkaitkannya dengan konsep neo-liberalisme sebagai sebuah gagasan sistem ekonomi baru yang berkembang beberapa dekade terakhir. Neo-liberalisme sebagai sebuah konsep tentang kebebasan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar, telah merasuk di konteks lokal dataran tinggi melalui introduksi carica. Meskipun bertumpu pada kekuatan pasar, intervensi Negara bukannya berkurang, justru membuka peluang dengan adanya kebijakan dan hak paten atas komoditas. Intervensi baru itu dilakukan melalui program sertifikasi komoditas yang disebut Sertifikasi Indikasi Geografis.*

**Kata Kunci:** *Komoditas, Politik Ekologi, Neoliberalisme, Sertifikasi Komoditas*

### Neoliberalisme sebagai Konsep Sistem Ekonomi Politik Global

Neoliberalisme sebagai isu utama tulisan ini perlu dipahami lebih dahulu konsepnya. Thorsen dan Lie menjelaskan neoliberalisme:

*“...as the return and spread of one specific aspect of the liberal tradition, namely economic liberalism. Economic liberalism is, basically, the belief that states ought to abstain from intervening in the economy, and instead leave as much as possible up to individuals participating in free and self-*

*regulating markets*"<sup>1</sup>(*what is neoliberal hal 2*)

Pembatasan intervensi pemerintah terhadap pasar merupakan hal yang esensial bagi neoliberalisme. Hal ini dikatakan oleh Ortner sebagai kebalikan dari teori Keynesian bahwa "pemerintah diharapkan ikut ambil bagian dalam ekonomi dan mempertahankan program-program sosial untuk kesejahteraan bersama"<sup>2</sup>.

Kemunculan neoliberalisme sebagai sebuah ideologi yang dominan dalam perekonomian dunia saat ini, merupakan hasil dari perkembangan ekonomi, politik dan filsafat, khususnya di Barat. Neoliberalisme bukan muncul dari satu fenomena yang mengakibatkan efek bola salju, akan tetapi hasil dari kumpulan fenomena-fenomena yang kompleks. Misalnya saja krisis tahun 1970-an sebagaimana yang disinggung David Harvey,

*"By the end of the 1960s embedded liberalism began to break down, both internationally and within domestic economies. Signs of a serious crisis of capital accumulation were everywhere apparent. Unemployment and inflation were both surging everywhere, ushering in a global phase of 'stagflation' that lasted throughout much of the 1970s. Fiscal crises of various states (Britain, for example, had to be bailed out by the IMF in 1975-6) resulted as tax revenues plunged and social expenditures soared"*<sup>3</sup>

Krisis ini, merupakan sebuah awal kebangkitan bagi sistem baru yang menjadi alternatif sistem perekonomian sebelumnya yang dianggap "gagal". Tanda-tanda lain yang menunjukkan kemunculan neoliberalisme bisa ditelusuri melalui perkembangan pemikiran di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini dimulai dengan munculnya *Mont Pelerin Society*<sup>4</sup> yang beranggotakan para akademisi Eropa. Orang-orang ini, kumpulan para intelektual ini mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah sistem ekonomi pasar itu seharusnya. Mereka mempunyai pandangan yang bertentangan dengan para *state interventionist* dan juga Marxist yang cenderung memberikan negara wewenang lebih dalam mengontrol pasar dan modal. Sedangkan "pionir neoliberalisme" ini beranggapan bahwa "kebanyakan dari keputusan pemerintah itu bias akan

1 Lihat Dag Einar Thorsen and Amund Lie. *What is neoliberalism?*. Department of Political Science University of Oslo. 2007. hal: 2, diunduh dari [folk.uio.no/.../What%20is%20Neo-Liberalism](http://folk.uio.no/.../What%20is%20Neo-Liberalism) pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.52 WIB

2 Lihat Sherry Ortner. On Neoliberalism. Dalam <http://aotcpress.com/articles/neoliberalism/> diunduh pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 20.59 WIB

3 Lihat David Harvey. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press: New York, 2005, hal: 21

4 *Mont Pelerin Society* adalah organisasi yang menggambarkan diri mereka sebagai liberal (dalam pengertian tradisional Eropa) karena komitmen fundamental mereka terhadap gagasan kebebasan individu. Label neoliberal mengisaratkan ketaatan mereka terhadap prinsip pasar bebas ekonomi neoklasik yang muncul pada pertengahan kedua abad ke-19 untuk menggantikan teori klasik Adam Smith, David Ricardo dan tentu saja Karl Marx (Harvey, hal 29)

kepentingan salah satu golongan yang berkuasa, yang tidak akan sanggup mengikuti perkembangan pasar”<sup>5</sup>.

Asumsi para penggagas neo-liberalisme ini, menurut Harvey, “...*that individual freedoms are guaranteed by freedom of the market and of trade is a cardinal feature of neoliberal thinking*”<sup>6</sup>. Kebebasan atau *freedom* merupakan salah satu konsep kunci dari pemikiran neoliberalisme, yang menjadi “tokoh utama” dibalik timbulnya pemikiran-pemikiran yang menjadi bibit neoliberalisme.

Meski menggunakan ‘kebebasan’ sebagai ‘jargon’ utamanya, neoliberalisme yang muncul sebagai ideologi dominan justru berkembang karena intervensi, dalam hal ini kekuatan internasional terhadap negara-negara dunia ketiga. Intervensi yang dilakukan kekuatan internasional khususnya Amerika Serikat dan Eropa, dilakukan dengan cara pemberian kredit bagi negara-negara berkembang. Kredit yang dikeluarkan oleh kekuatan internasional ini bukan sembarang kredit, melainkan “kredit yang bersyarat”. Seperti yang Harvey jelaskan, “*In return for debt rescheduling, indebted countries were required to implement institutional reforms, such as cuts in welfare expenditures, more flexible labour market laws, and privatization. Thus was ‘structural adjustment’ invented*”<sup>7</sup>.

Semua perombakan yang sudah disebut diatas merupakan salah satu upaya untuk mempenetrasi paham neoliberalisme melalui kekuatan (*force*). Hal ini tentu saja berkaitan dengan pergolakan politik di Amerika Serikat sendiri dengan terpilihnya Reagan sebagai presiden Amerika Serikat dan menjatuhnya Margaret Thatcher sebagai perdana menteri Inggris yang sama-sama mendukung paham neoliberalisme dengan kebijakan-kebijakan seperti seperti yang sudah dijelaskan.

Berangkat dari asumsi neoliberalisme sebagai sebuah gagasan sistem ekonomi global yang bertumpu pada mekanisme pasar telah masuk ke ranah lokal, kami ingin melihat lebih jauh seperti apa kontradiksi-kontradiksi yang hadir di dataran tinggi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di dataran tinggi Dieng, Kejajar, Wonosobo. Transformasi agraria Dieng menarik untuk dikaji dalam konteks wacana neoliberalisme, ditandai dengan adanya ekspansi komoditas carica (pepaya Dieng) atas komoditas kentang.

## **Problematika Kentang Dieng**

Komoditas kentang yang dikembangkan di Dieng bukan semata-mata strategi masyarakat setempat melihat peluang ekonomi dari tanaman kentang. Dalam konteks historis, kentang diintroduksi di sana merupakan pengembangan

---

5 *ibid*, hal: 31

6 *ibid*, hal: 16

7 *ibid*, hal: 38

pangan global di dataran tinggi. Roudhotun Arbangiyah pernah melakukan studi historis mengenai perkembangan dan pengaruh introduksi kentang di Sembungan, Dieng<sup>8</sup>. Berdasarkan studinya, kentang diintroduksi ke Indonesia tahun 1811, khususnya ke Brastagi, Sumatera Utara. Kemudian berkembang ke beberapa daerah: Kerinci (Jambi), Pangalengan (Jawa Barat), Dieng (Jawa Tengah), Tengger (Jawa Timur) dan Toraja (Sulawesi Selatan)<sup>9</sup>. Sampai akhir tahun 1970-an zaman penanaman kentang varietas baru di Sembungan belum berlangsung. Pada saat itu lahan-lahan pertanian didominasi tanaman tembakau, sayuran kubis, dan kacang Dieng. Kentang varietas baru, mulai diperkenalkan di wilayah ini pada tahun 1979 oleh Muqodas, seorang petani dari Desa Patak Banteng, sebuah desa di bawah desa Sembungan<sup>10</sup>.

Bahkan menurutnya, tahun 1978 sekitar 75 persen tanah pertanian di Sembungan dikuasai oleh petani-petani dari Patak Banteng. Pada tahun tersebut pula petani-petani Patak Banteng berhasil memproduksi hingga mencapai 20-30 ton/ ha. Jika dihitung keuntungannya, dengan harga jual pada saat itu Rp 550/kg kira-kira bisa mencapai Rp 11 juta sampai Rp 12.5 juta rupiah tiap hektarnya. Setelah dipotong biaya modal meliputi biaya pupuk, pengolahan tanah dan bibit sekitar Rp 3 juta/ha, maka keuntungan bersih petani sebesar Rp 8 juta hingga Rp 15.5 juta. Sejumlah uang yang sulit dibayangkan oleh petani Sembungan yang pada waktu itu rata-rata penghasilannya hanya Rp 166.000<sup>11</sup>. Menjelang tahun 1980-an, perkembangan yang signifikan itu kemudian terus merambah ke desa-desa sekitarnya, termasuk Sembungan, desa tertinggi di Jawa.

Kehadiran kentang ini menandai adanya perubahan orientasi sistem ekonomi masyarakat dataran tinggi Dieng, dari subsistensi ke sistem pertanian berbasis komersial. Sistem pertanian yang dibangun oleh masyarakat Dieng diarahkan untuk kepentingan-kepentingan pasar dan , sirkulasi ekonomi dan Perubahan ini tentu saja tidak secara total. Masyarakat setempat masih menggunakan sistem subsistensi, terutama pada rentang masa tanam dengan masa panen. Hal ini terlihat dari strategi masyarakat setempat mengembangkan berbagai tanaman lain di samping kentang: kacang babi, loncang, buncis merah,

8 lihat Roudhotun Arbangiyah. "Perubahan Pola Pertanian Rakyat di Desa Sembungan Dataran Tinggi Dieng". Skripsi jurusan Sejarah Universitas Indonesia. 2013

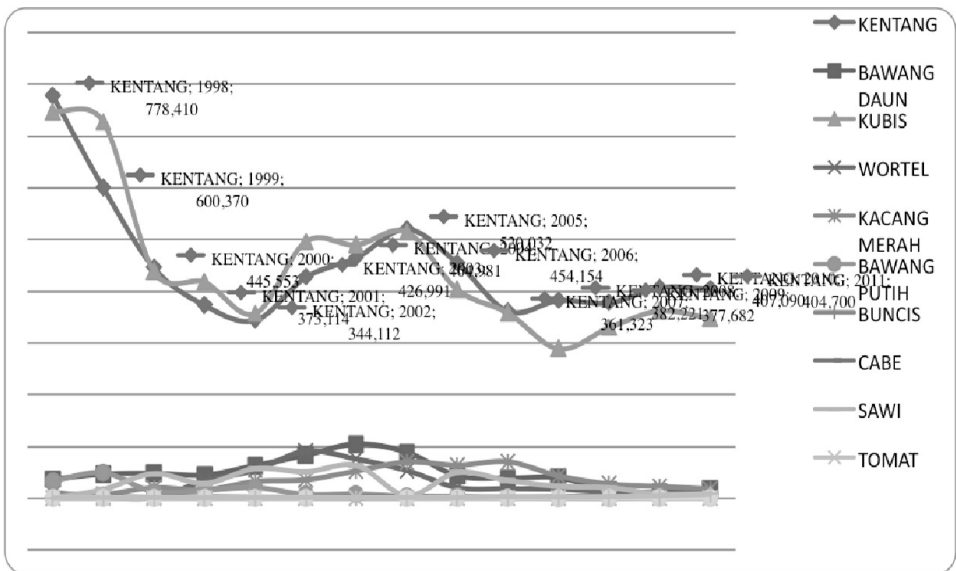
9 Ibid, hal: 3, lihat juga Adiyoga, W. A. *Pola Pertumbuhan Produksi Beberapa Jenis Sayuran Di Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang. 1998

10 Ibid, hal: 4

11 Perhitungan ini, berdasarkan keterangan Arbangiyah, dilakukan terhadap tanah seluas 300 keranjang (sekitar 0.4 ha) yang disewakan dengan harga Rp 100.000 per musim. Sementara untuk komponen tenaga kerja dalam satu musim perhitungannya sebagai berikut. Jika satu musim terdiri dari 12 minggu dan dalam satu minggu rata-rata curahan tenaga kerja buruh laki-laki empat hari dan butuh perempuan dua hari, maka jumlah total curahan tenaga kerja buruh laki-laki dan perempuan dalam satu musim masing-masing 48 Hari Orang Kerja (HOK) dan 24 HOK. Apabila dirupiahkan jumlahnya adalah  $48 \times \text{Rp } 1000 = \text{Rp } 46.000$  untuk buruh laki-laki dan  $24 \times \text{Rp } 750 = \text{Rp } 18.000$  untuk buruh perempuan. Total upah buruh adalah Rp 166.000.

cabai bandung, dan sebagainya.

Potensialitas kentang dalam konteks ekonomi tersebut, tidaklah sederhana anggapan komoditas kentang mendatangkan kesejahteraan baru. Arbangiyah yang mengkaji perubahan itu sampai tahun 1995, menengarai ada perubahan sosial yang dibarengi dengan perubahan jenis komoditas. Produksi kentang di Dieng terus berlanjut sampai tahun-tahun belakangan. Justru keberlanjutan produksi pertanian ini menjadi salah satu agenda Dinas Perdagangan Nasional, sebagai sumber ekonomi yang relatif mapan sejak tahun 1997-2009 dalam menghadapi ancaman krisis global<sup>12</sup>. Sebagaimana pernyataan intervensinya, “mengingat sektor pertanian masih mampu bertahan meskipun terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997, dan krisis global beberapa tahun terakhir ini sehingga dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional”<sup>13</sup>.



**Grafik 1:** Fluktuasi produksi hasil pertanian di Kejajar

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, dan Badan Pusat Statistik Kecamatan Kejajar

Proses perkembangan produksi kentang di Dieng menemui berbagai persoalan yang terus berkelindan. Satu persoalan pokok yang dihadapi oleh petani setempat adanya degradasi ekologi akibat ekspansi teknologi untuk meningkatkan

<sup>12</sup> lihat Pusat danta dan informasi pertanian. “Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian”. Volume 1 No. 1, 2009, hal: 1

<sup>13</sup> ibid.

produksi atas pertimbangan potensialitas komoditas kentang tersebut. Ekspansi teknologi pengolahan itu meliputi proses pemupukan, pengobatan, pengairan, dan pembukaan lahan-lahan baru semasa reformasi.

Degradasi ekologi sebagai masalah lanjutan justru berdampak pada produksi kentang yang semakin menurun sejak masa reformasi (1999). Berikut data perkembangan produksi pertanian wilayah Kejajar secara umum dalam Kejajar dalam Angka 1999-2011. Berbagai komoditas tersebut menggambarkan fluktuasi yang sangat signifikan mengenai apa yang sedang terjadi di wilayah Dieng.

Pertautan komoditas kentang dengan tanaman lainnya menunjukkan juga perubahan mendasar strategi masyarakat setempat membangun basis pertanian yang relevan dalam konteks ekologi maupun aspek lainnya. Pembahasan ini akan kami analisis menggunakan paradigma Ekologi Politik.

## **Ekologi Politik Sebagai Pendekatan**

Pendekatan Ekologi-Politik berkembang dalam cabang antropologi ekologi. Benjamin S. Orlove mendefinisikan disiplin antropologi ekologi sebagai *“the study of the relations among the population dynamics, social organization, and culture of human populations and the environments in which they live”*<sup>14</sup>.

Pendekatan ekologi politik sebagai salah satu paradigma dalam antropologi ekologi, mulai berkembang sejak permasalahan degradasi lingkungan akibat deforestasi di berbagai wilayah di dunia semakin meningkat. Pendekatan ini dikembangkan oleh beberapa pakar lingkungan seperti Peterson (2000), Bryant (1992), Andrew Vaida (1983), Baikie dan Brookfield (1987), Abe-Ken-Ichi (2003).

Pendekatan “ekologi politik”, oleh Peterson, merupakan salah satu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan (ekologi budaya) dengan politik ekonomi dan dinamika antara lingkungan dengan manusia, antara kelompok bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu-lokal kepada transnasional secara keseluruhan<sup>15</sup>. Asumsi dari pendekatan ini, berdasarkan pandangan Naess, “kesembronoan manusia dilihat sebagai nilai yang paling penting dalam melihat degradasi lingkungan”<sup>16</sup>. Paradigma ini lahir dari kritik terhadap studi ahli lingkungan yang melihat kerusakan alam akibat

14 Lihat Benjamin Orlove . “Ecological Anthropology” dalam *Annual Review of Anthropology IX*. Tahun 1980. hlm: 235-6

15 Peterson. 2002, dalam Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian (eds) (2011). *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm: 8

16 Naess (1987) dalam Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts . *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge. 1996, hlm: 23-24

ulah penduduk setempat sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan itu<sup>17</sup>, maupun akibat dari aktivitas ekonomi yang semakin bebas, meningkatnya investasi secara global, sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani persoalan ini<sup>18</sup>.

Cakupan studi yang begitu luas di atas, dipersempit oleh Sinead Bailey dalam bukunya, *“Third World Political Ecology.”* Melalui buku itu, dia mencoba memberikan arah bagaimana pandangan Pett dan Watts di atas, digunakan dalam memahami proses-proses perubahan ekologi di Dunia Ketiga. Menurutnya, seorang ekolog politik harus melihat perubahan lingkungan Dunia Ketiga dan konflik dalam terma problem lingkungan (permasalahan ekologi), konsep pembangunan berkelanjutan, karakteristik sosial ekonomi, aktor-aktor (negara dan pasar), serta wilayah khusus<sup>19</sup>. Bailey sudah memberikan arah, bagaimana perubahan lingkungan yang politis tersebut dapat dipahami. Menurutnya, pendekatan ini berawal dari penjelasan bagaimana perubahan lingkungan tersebut bisa berlangsung. Selanjutnya, perubahan itu direlasikan dengan proses-proses politik ekonomi<sup>20</sup>.

Jejak-jejak penelitian dengan menggunakan pendekatan politik ekologi, terlihat pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Roy Ellen, pada studinya mengenai hutan di Nuauulu<sup>21</sup>. Penelitian ini dilakukan di luar Jawa dimana ketegangan antara penduduk lokal dengan pendatang, pemerintah dan investor sangat besar. Apalagi fokus penelitiannya berada pada masyarakat yang tinggal di daerah hutan. Belum adanya penelitian yang menggunakan pendekatan ini di Jawa membuat saya tertarik untuk mengembangkannya.

## **Politik Kentang**

Sebagaimana yang sudah kami singgung di atas, kehadiran kentang bukan serta-merta strategi masyarakat setempat mempunyai kearifan lokal yang canggih. Kehadiran ini justru dipicu oleh agenda politik-ekonomi Negara modern untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dataran tinggi, maupun secara keseluruhan. Semenjak kentang diintroduksi dari Sumatera dan terus berkembang ke berbagai daerah, Dieng menjadi salah satu agenda pembangunan perekonomian Negara yang berpotensi sebagai komoditas perdagangan internasional. Di samping

17 Lihat juga Grossman *“The Political Ecology of Bananas: Contract Farming, Peasants, and Agrarian Change in Eastern Caribbean”*. University of North Carolina Press. tahun 1997

18 Lihat Richard Peet dan Watt. Ibid: 24

19 Lihat Sinead Bailey “Introduction”, dalam *Third World Political Ecology*. 1997 hal: 1

20 Bailey, *ibid*: 27-28

21 Lihat Roy Ellen “pengetahuan tentang hutan, transformasi hutan: ketidakpastian politik, sejarah, ekologi, dan renegosiasi terhadap alam di seram tengah”, dalam Tania Li, (ed.) “Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002, hl:205-246



itu, FAO pun ikut andil dalam proses pengembangan kentang sebagai salah satu tanaman pangan global. Berdasarkan informasi dalam *International Year of Potato* tahun 2008, kentang menjadi salah satu agenda global menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan ancaman lingkungan. Tiga agenda itulah yang menjadi misi FAO

*“The potato is already an integral part of the global food system. It is the world’s number one non-grain food commodity, with production reaching a record 325 million tonnes in 2007. Potato consumption is expanding strongly in developing countries, which now account for more than half of the global harvest and where the potato’s ease of cultivation and high energy content have made it a valuable cash crop for millions of farmers.”<sup>22</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, kentang menjadi potensi karena pertimbangannya sebagai sumber energi manusia dunia. Pertimbangan inilah yang membuat kentang menjadi komoditas ekspor-impor pangan dunia. Tidak hanya itu saja, harga kentang yang dihasilkan dari proses tawar-menawar di tingkat harga lokal, menjadi pertimbangan penunjang FAO untuk menjadi salah satu tanaman yang memberi keuntungan pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Ketahanan pangan berbasis kentang menjadi pilihan karena produksinya yang relatif cepat dalam lahan yang terbatas di dataran tinggi. Ditambah pengelolaan berbasis rumah tangga memungkinkan kemudahan untuk proses-proses manajemen<sup>23</sup>.

Dalam konteks politik global ini, munculnya produksi kentang menandai adanya intervensi Negara maupun FAO yang sangat dominan. Misi besar mereka untuk menanggulangi kelaparan, mengharuskan produksi ini tetap berlanjut. Padahal data BPS di atas menunjukkan, semenjak reformasi produksi kentang justru menurun sangat tajam. Meskipun tahun 2003-2005 sempat naik 66 %. Meski demikian, tetap saja tidak ada kenaikan yang signifikan di tahun-tahun selanjutnya. Upaya-upaya politis untuk mendongkrak hasil kentang yang semakin menurun, tidak memberi hasil yang memuaskan. Dengan demikian, tentu ada persoalan lain yang mempengaruhi fluktuasi produksi ini. Konteks ekologi tentu saja menjadi faktor yang penting karena aktivitas pertanian tidak lepas dari kondisi-kondisi dukungan ekologis.

## **Kentang Dieng dan Kontestasi Ekologi**

Satu informasi yang mengejutkan dari seorang petani di Patak Banteng

---

22 Lihat *New Light of Hidden Treasure*. International Year of Potato Roma. 2008, hal: 3 diakses dari <http://www.potato2008.org/en/events/book.html> pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 11: 24 WIB

23 Lihat, *Potato in Highlands: Increasing profits and improving*, dalam <http://cipotato.org/research/potato-in-highlands> yang diunduh pada tanggal 28 februari 2013 pukul 13.29 WIB



mengenai ingatan menurunnya hasil produksi pada kiris moneter sebelum reformasi, bukanlah didorong oleh kondisi ekologis yang rusak semata. Masa reformasi menjadi awal dirasakannya penurunan produksi kentang oleh para petani disini. Harga kentang turun akibat inflasi selama empat tahun. “Harga pestisida saja 1 kg-nya, awalnya hanya 12-13 ribu, tapi waktu itu naik jadi 24 ribu/kg, naik lagi 30 ribu/kg, naik lagi 40ribu/kg”, terangnya.

Ambruknya nilai rupiah sebenarnya disebabkan oleh peredaran uang yang sangat besar melalui pembiayaan KUT (Kredit Usaha Tani). Program kredit yang diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan produksi kentang setelah diadakannya perluasan lahan ke gunung atas perintah Perhutani. Melalui kredit ini, tiap kepala/orang bisa mendapat 15 juta/hektar dan maksimal dua hektar. Akan tetapi penurunannya melalui kelompok tani.

Penebangan hutan pasca reformasi merupakan cerita klasik tentang siapa sebenarnya dalang penebangan itu<sup>24</sup>. Catatan kami menunjukkan, beberapa petani menyebut penebangan yang mereka lakukan waktu itu atas perintah Perhutani dan Dinas Pertanian untuk keperluan perluasan produksi kentang yang sangat menguntungkan. Proses penebangan yang sangat luas, membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi pengerjaannya dilakukan dalam unit keluarga yang didorong adanya KUT sebesar 15 juta per hektar. Lamanya proses penebangan dan penyediaan modal yang besar inilah, membuat produksi kentang tidak lagi dikerjakan secara serius yang berdampak pada produksi yang menurun. Beredannya uang yang cukup besar di Dieng, membuat harga kentang menurun.

Menurut keterangan Rd (43-an tahun), perluasan lahan ke gunung justru membawa kegagalan karena konstruksi lereng dan jenis tanah yang berbatuan, membuat kentang tidak bisa tumbuh dengan bagus. “Bertani diwilayah gunung itu malah bangkrut. Tapi juga mungkin karena dengan tanah yang luas, sampai ke gunung juga, sedangkan hasilnya tidak besar. Orang sini *apa anane*, hukum alamlah, karena bukan haknya. Sejak ada yang bangkrut itu tidak ada lagi yang berani mencangkul gunung, karena Tuhan tidak meridhoi”, begitu katanya sambil mengenang ingatan itu.

Ekspansi tanah yang semakin luas di Dieng membawa problem baru pada ketersediaan tenaga kerja. Padahal, perekonomian kentang mulai mapan di tahun 2003 sampai 2004 dengan kenaikan produksi yang cukup berarti. Wilayah tempat berasalnya tenaga kerja pengelolaan kentang: Mojotengah dan Garung (dua kecamatan di bawah Kejajar), menjadi sentra pengembangan cabai merah

---

24 Mengenai sejarah dan kajian etnografis kasus penebangan hutan secara besar-besaran pasca-reformasi, bisa dilihat Hery Santoso, “Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa. Yogyakarta: Damar. 2004 maupun Anu Lounela “Contesting forests and power; dispute, violence and negotiation in Central Java”. PhD. *Research Series in Anthropology* 17. Helsinki, Finland: University of Helsinki.”. Mengenai studinya di hutan Wonosobo.

pada tahun 2005. Pengembangan cabai sebagai program pengembangan kapasitas masyarakat di kaki pegunungan Dieng memang berdampak pada kesejahteraan para tenaga kerja. Terlebih dengan harga cabai yang dari tahun ke tahun terus naik bahkan sempat sampai Rp 80.000 /kg. Di sisi lain, hal ini membawa dampak pada pengelolaan produksi kentang. Hal ini juga ditandai dengan naiknya harga tenaga kerja dari Rp 17.500-20.000 selama 9 jam, menjadi Rp 25.000-30.000 dengan jam yang sama. Di samping itu, migrasi penduduk dataran tinggi ke kota-kota maupun luar Jawa, ikut mempengaruhi penurunan ini. Dengan demikian, tidak adanya sinkronisasi pengembangan program antar-wilayah menjadi problem pokok pelaksanaan pembangunan perekonomian kentang di Dieng.

Di samping itu, kontestasi ekologi semakin mencuat ketika ada kasus longsor dan banjir erosi di tahun 2007-2008. Tiga longsor besar dan empat banjir besar sempat terjadi di tahun 2008<sup>25</sup>. Terjadinya longsor ini berakibat pada pemindahan dusun ke daerah yang cukup landai. Data yang diambil oleh TKPD (Tim Kerja Pemulihan Dieng) ini, memberi gambaran nyata akan adanya kesadaran ekologis yang “tengah rusak” diantara subyek-subyek yang berkepentingan terhadap pengembangan Dieng. TKPD ini merupakan sebuah organisasi untuk konservasi wilayah Dieng. TKPD mengatasi masalah sumber air, karena banyak mata air yang menyusut lantaran tidak ada pepohonannya. Sehingga, kalau musim kering kemarau yang susah bukan orang gunung atas sini tapi orang bawah. TKPD ini mencakup 8 desa, yaitu: Parikesit, Dieng, Sembungan, Jojogan, Tieng, Sigendang, Campursari, dan Sikunang.

Problem ketersediaan air sebagai salah satu sumber yang harus tersedia untuk produksi kentang mengharuskan petani untuk membangun pola pengelolaan yang baru<sup>26</sup>. Petani kemudian mengurangi pola penanaman dari tiga kali menjadi dua kali. Cara ini digunakan untuk memperpanjang masa *bera* (istirahat tanah). Tentu saja, hal ini berdampak pada berkurangnya produksi kentang di tahun-tahun berikutnya. “*Biasanya setelah semusim (tiga bulan atau 100 hari) masa tani kentang itu kemudian musim berikutnya sudah tidak untuk untung/hasilnya tidak bagus lagi*”, tutur Kz.

Menurunnya produksi kentang juga berimbas pada penurunan pendapatan. Dari sinilah muncul kontestasi ekologi dan ekonomi. Kontestasi ini dibawa ke dalam satu wacana besar tentang bagaimana Dieng hendak dibentuk, dikelola, dan

---

25 Diambil dari Survey data potensi kawasan Dieng tahun. Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) tahun 2011

26 Untuk menyemprot, tanah sekitar 1/8 hektar membutuhkan 1/2 drum air. Di musim kemarau karena tidak bisa tadah hujan makan airnya membeli dari yang punya air di bawah, harganya 15 ribu/drum. Waktu musim kemarau nyemprotnya baru dilakukan setiap 7-10 hari sekali tapi kalau musim hujan nyemprotnya tiap 4 hari sekali. Disamping gubuk milik Pak Kz itu ada kolam tadah hujan untuk air ketika musim hujan volumenya sekitar 2m x 2m x 2m. Dia biasa pakai insektisida dimusim kemarau, sedangkan dimusim penghujan biasanya memakai fungsida.

diatur agar keduanya mampu memberikan keuntungan ekonomis dan ekologis sekaligus.

Program konservasi yang dijalankan di Dieng bergerak pada penanaman pohon pegunungan untuk perbaikan pengairan. Reboisasi ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2005 dan dilanjutkan tahun 2009 dengan program RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung). Program konservasi ini tidak membuahkan hasil yang maksimal. Dana 29 juta untuk penyediaan bibit pohon seluas 25 hektar tiap desa hanya hidup separuhnya saja. Tidak berjalannya program konservasi dikarenakan tidak ada nilai ekonomi yang sebanding dengan kentang. Ada pendapat logis mengenai kegagalan penanaman pohon ini dari Sy,

*“Yang merusak tanah itu ya pengobatan. Untuk pemulihan tanah, seharusnya dari atasan (pemerintah) mengembalikannya dengan pupuk organik. Hasilnya ya lebih baik, tapi itu tidak sekaligus. Sini berbeda dengan Sembungan. Kalau di Sembungan yang tanahnya rusak, di sana mereka bisa merotasi tanaman, di sana ditanami kubis, yang lainnya kentang, itu bisa, tapi kalau di sini yang tanahnya hanya sedikit. Mau dirotasi seperti di sana untuk mengembalikan, nanti masalahnya misalnya mau ganti kubis, pas nanam harganya 3-4 ribu, tapi waktu panen hanya 800 rupiah, lha gimana, tetapi kalau kentang kan terus, harganya relatif stabil”*

Apa yang bisa kita pahami dari pernyataan tersebut, terdapat satu petunjuk adanya kontradiksi yang jelas antara prioritas ekologi dan ekonomi. Belum lagi petani dihadapkan pada persoalan modal dan kredit. Ini artinya, petani mempunyai hutang kepada orang-orang kaya maupun bank-bank. Pentingnya modal dalam sirkulasi produksi dikarenakan naiknya harga obat-obatan dalam dosis yang cukup tinggi akibat semakin kebalnya penyakit tanaman dan kondisi hara tanah yang semakin buruk. Hutang ke bank untuk sekali masa tanam mencapai Rp 4.500.000-5.000.000 dengan pengembalian mencapai Rp 6.000.000.

Masalah modal dalam pembangunan perekonomian memang menjadi solusi teknis paling prioritas. Tahun 2011, Dinas Pertanian menurunkan bantuan sebesar Rp 100.000.000 kepada setiap Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di seluruh Kejajar dan Batur (Banjarnegara). Ada kontradiksi baru dengan hadirnya bantuan modal sebagai solusi untuk keberlanjutan produksi sebab, adanya modal berimplikasi pada hutang dan ikatan yang ketat ini mengharuskan adanya perluasan dan perbanyakkan pemasukan untuk menutup bunga dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pasar harus semakin terbuka.

Salah satu strategi petani kentang di Parikesit untuk meningkatkan pemasukan, adalah mengurangi pengeluaran untuk transportasi dan biaya tenaga. Cara ini ditempuh dengan membuat jalan yang bisa dilalui mobil angkut ke tegal-

tegal mereka sampai pelosok. Dalam kesempatan mengikuti rapat pembuatan jalan di desa Parikesit, ada sebuah program besar pelebaran jalan sepanjang 800 meter dan lebar 2,5 meter. Nr, informan kami, membuka rapat pelebaran jalan dengan mengatakan, *“dalam niki kebutuhane dewek, sanes kebutuhane wong mriko-mriko. Kabeh iku kebutuhan ekonomi, nek diniati ngibadah dados dalam ngibadah, mboten usah khawatir, mangke kangge anak putu kulo panjenengan sedoyo”* (jalan itu kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Semua itu kebutuhan ekonomi, tetapi kalau diniati ibadah maka menjadi jalan ibadah. Tidak usah khawatir, itu untuk kepentingan anak-cucu kita).

Sebuah pernyataan yang menarik bagaimana masyarakat setempat membangun wacana dalam konteks pengetahuan mereka mengenai hidup. Rapat yang berjalan sekitar tiga jam, membuahkan kesepakatan untuk membuat jalan dengan kriteria iuran bergantung pada jauh-dekatnya tegal dengan jalan baru tersebut. Jalan tersebut rencananya bisa dimanfaatkan oleh sekitar 113 penggarap/pemilik lahan. Jalan sebagai perbaikan infrastruktur menggambarkan kondisi nyata bagaimana ekologi Dieng hendak dibentuk. Pelebaran jalan ini juga menunjukkan pelebaran akses dan upaya intervensi politik kelas atas yang mempunyai kendaraan untuk membuat dan memanfaatkan peluang baru. Pernyataan Nr di atas menunjukkan sedikit banyak pengaruh neo-liberalisme, terutama menyangkut penerapan relasi ekonomi di setiap bentuk relasi. Jalan sebagai wilayah yang bersifat publik ditransformasi menjadi ranah yang bersifat ekonomis.

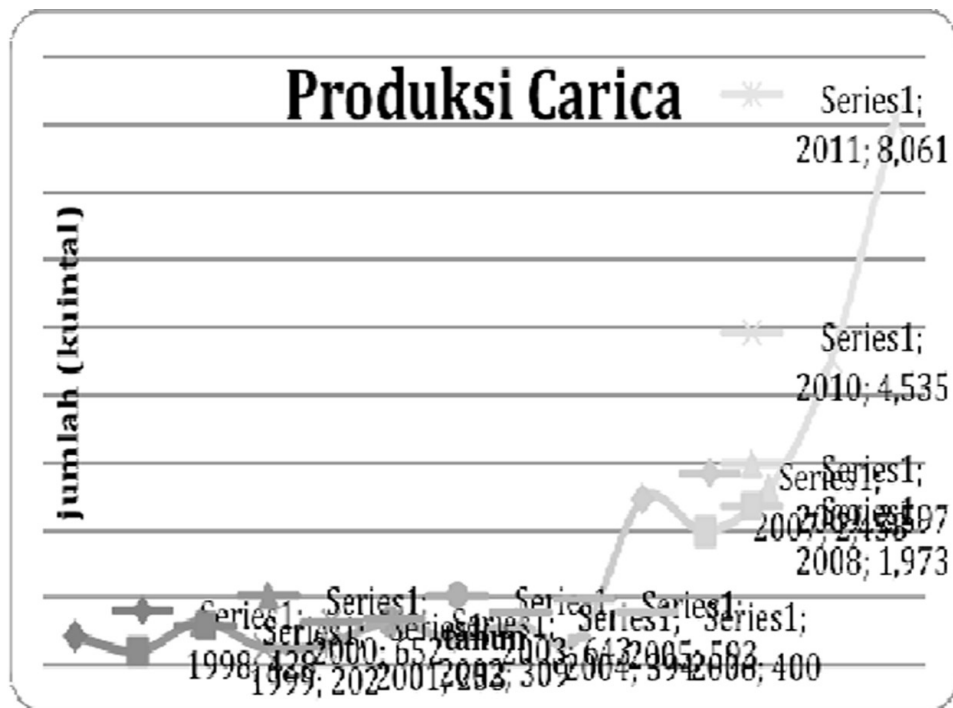
Tidak adanya keinginan untuk mengelola bantuan kredit atas pertimbangan hutang dan ikatan, di samping upayanya mempermudah akses ke tegal, membuat berbagai kontradiksi-kontradiksi itu semakin tajam. Selain itu, kontradiksi ini memperlihatkan bagaimana proses dialektika antara masyarakat setempat, pemerintah maupun lembaga konservasi dengan konteks ekologis. Hasil dialektika tersebut semakin nyata dengan diwujudkannya pengembangan komoditas baru bernama carica, purwaceng, dan terung Belanda. Pengembangan ketiga komoditas ini, oleh pemerintah kecamatan disebut dengan program “Telur Emas”. Di antara ketiga komoditas tersebut, hanya carica yang cukup memberi peluang baru untuk pengembangan perekonomian masyarakat Dieng. Artinya, tampak ada pintu intervensi baru dari pemerintah terhadap perekonomian pertanian setempat.

### **Carica sebagai Komoditas Baru**

Carica sebagai tanaman buah, secara historis dikenalkan oleh PT Dieng Jaya milik isteri Presiden Soeharto yang berdiri sekitar tahun 1980-an. Perusahaan ini bergerak pada budidaya jamur dan sedikit carica. PT Dieng Djaja merupakan perusahaan pengolah jamur terbesar yang dirintis almarhum Teguh Sutantyo pada

awal 1970 mengalami masa kejayaan pada 1980-an. Namun dari 1994 sampai 2002, kondisi perusahaan terus merosot. Dan, pada 2003 perusahaan menghentikan produksi.

Sampai tahun 2000-an, carica masih ditanam sebagai batas tegal dan konsumsi rumahan. Produksi ini memperlihatkan perkembangannya semenjak tahun 2007. Komoditas ini mulai menampakkan nilai ekonomisnya semenjak ada inovasi pengolahan carica menjadi manisan maupun selai. Meningkatnya nilai ekonomis carica ini ditanggapi pemerintah Wonosobo. Maksudnya, carica dihak-patenkan menjadi tanaman yang secara khas hanya ada di Wonosobo. Padahal secara historis, carica bukanlah tanaman endemik yang hidup di Wonosobo, melainkan atas introduksi PT Dieng Djaja. Lantas bagaimana privatisasi ini berdampak pada pengelolaan ekologi, perekonomian, dan konteks sosial maupun politik?



Grafik 2: Produksi carica

Sumber: Dieng dalam Angka tahun 1999-2011, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Hak paten atas komoditas, merupakan sebuah program pemerintah yang bernama Sertifikasi Indikasi Geografis. Sertifikasi ini diatur dalam PP (peraturan pemerintah) no 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis<sup>27</sup>. Sertifikasi indikasi geografis “merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu.” Tanda dan kekhususan yang sudah dijelaskan diatas diharapkan “dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang”<sup>28</sup>.

Pematenan carica atau sertifikasi indikasi geografis carica mulai diupayakan pada tahun 2011 oleh Pemkab Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan pemerintah Jawa tengah dan DPRD Jawa Tengah<sup>29</sup>. Hal ini dilakukan untuk menjawab keresahan “dari para perajin carica dan purwaceng bahwa produk-produk asli Wonosobo tersebut diincar pemodal dari luar daerah sebagai komoditas bisnis”<sup>30</sup>. Pihak yang mengajukan sertifikasi ini bernama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng. tidak hanya carica, MPIG juga mendaftarkan purwaceng sebagai kekayaan daerah Dieng-Wonosobo dibawah logonya sendiri yaitu Purwaceng Dieng. kedua produk pertanian diatas sudah terdaftar secara resmi dan “bersertifikat” indikasi-geografis tertanggal 20 juli 2012<sup>31</sup>.

Adanya hak paten carica sebagai sesuatu yang dianggap khas Wonosobo, membawa dampak signifikan pula terhadap perubahan sistem politik-ekonomi Dieng. Hal ini berkaitan dengan klaim “otentisitas” atas komoditas carica sebagai produk “asli” Dieng atau Wonosobo. Hak paten atas komoditas ini mendorong produksi carica naik secara tajam sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Dengan demikian, Pemerintah setempat membuka ruang intervensi baru melalui pengembangan carica dengan penilaian masyarakat setempat masih memproduksi carica dalam bentuk mentah atau olahan tanpa label. Carica dinilai bisa mengurangi erosi tanah melalui perakarannya yang cukup kuat, tidak menghalangi fotosintesis untuk tanaman sayuran, merupakan tanaman tahunan

27 Diunduh di laman <http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/referensi-hukum-indikasi-geografis> pada tanggal 10 april 2013 pukul 20:51

28 Lihat PP (Peraturan Pemerintah) No. 51 tahun 2007, hal: 1

29 Lihat, “Pemkab Wonosobo Patenkan Purwaceng dan Carica”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2011/10/10/1709338/Pemkab.Wonosobo.Patenkan.Purwaceng.-dan.Carica>

30 *ibid*,

31 Lihat “Indikasi Terdaftar dan Alamat” diunduh di laman [http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan\\_ig\\_terdaftar.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan_ig_terdaftar.pdf) pada tanggal 10 april 2013 pukul 21.00. di dalam daftar tersebut, Carica tercatat dengan nomor agenda: IG.00.2011.00008, sedangkan Purwaceng tercatat dengan nomor agenda: IG.00.2011.00007 dan nomor pendaftaran : untuk carica, ID G 000000016; dan untuk purwaceng, ID G 000000015

yang tidak akan memakai obat-obatan dalam dosis yang banyak. Dengan demikian, seolah carica mempunyai nilai ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan dengan sayuran. Jadi, intervensi yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk melindungi petani, produsen, dan pedagang carica di Dieng. Intervensi tersebut tetap ada, tetapi hanya digunakan untuk ‘memuluskan’ kerja pasar.

Pemerintah kecamatan, semenjak ada hak paten, terlihat bersemangat melalui program baru tersebut. Menurut camat setempat, carica dan purwaceng ditengarai bisa mengantisipasi anjloknya ekonomi kentang. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun basis atau sentra produksi carica di berbagai desa yang dinaungi dibawah satu koperasi di kecamatan. Melalui koperasi ini, proses jual-beli, produksi, dan distribusi produk akan diatur lebih lanjut.

Satu hal yang patut diselami lebih dalam, kehadiran carica justru memicu munculnya kelas usahawan-usahawan di dataran tinggi dieng. Sebuah status kelas yang muncul atas kuasanya membangun basis pasar yang lebih luas untuk pengembangan produksi carica. Dengan demikian, setiap perubahan komoditas pertanian, melahirkan pula perubahan sosial ekonomi yang mendasar.

### **Neoliberalisme dan Negosiasi di Ranah Lokal**

Datangnya komoditas baru buah dan obat sebagai salah satu alternatif pokok pengganti kentang, mencerminkan kontradiksi-kontradiksi yang menonjol. Berkurangnya produksi tanaman pangan tentu saja akan berdampak pada ketahanan pangan nasional maupun global. Kehadiran carica menandai adanya perluasan kekuatan pasar dalam program-program pengembangan kesejahteraan. Ekspansi pasar di Dieng, dalam pandangan kami, disebabkan adanya krisis kepercayaan para petani terhadap pemerintah yang dinilai tidak pernah berhasil menangani penurunan kentang.

Dalam suatu kesempatan, kami bertemu dengan petani Patak Banteng. Dia bercerita tentang aspirasi petani meminta bantuan alat untuk mengukur kadar kesuburan tanah. Pengetahuan petani akan kebutuhannya pada alat itu, semenjak ada perusahaan pupuk melakukan tes terhadap kadar keasaman tanah akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Menurutnya, keinginan itu dikabulkan Dinas Pertanian setempat dengan menganggarkan dana bantuan sebesar 1,5 milyar rupiah. Malangnya, dana sebesar itu tidak sampai ke Gapoktan setempat. Menurut keterangannya, dana itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau dikorupsi karena tidak ada kejelasan kemana uang itu diturunkan. Lurah setempat pun menyusun proposal lagi, akan tetapi sampai penelitian ini dilakukan, belum ada jawabannya.

Tidak tepatnya sasaran bantuan ini, memicu krisis kepercayaan petani



terhadap pemerintah. Peluang paling besar petani untuk mengatasi permasalahan produksi kentang ialah masuk ke “ruang” pasar carica. Padahal, harga setiap kilogram carica hanya berkisar Rp 2.000-3.000 setelah dua tahun masa tanam. Jumlah yang cukup jauh dengan nilai kentang justru merupakan pilihan yang dianggap paling logis. Pilihan ini dipengaruhi oleh dukungan TKPD sebagai tanaman yang ramah secara ekologis, misalnya sebagai penahan terasering. Dengan demikian, masuknya intervensi pasar yang semakin luas dipicu kontradiksi-kontradiksi dan kontestasi ekologi, ekonomi, dan politik.

Inilah dinamika neoliberalisme di Dieng, intervensi Negara mengenai perlindungan terhadap carica memberikan “akses” pasar kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini bukan untuk mengatur carica sebagai alternatif tanaman pengganti kentang yang dianggap merugikan secara ekologis saja, akan tetapi upaya membuka akses carica ke mekanisme pasar.

Perspektif ekologi politik memberi kerangka yang cukup representatif dalam membingkai kontestasi wacana pengembangan perekonomian berbasis pertanian di dataran tinggi Dieng. Satu catatan yang penting dari studi ini, adalah penting untuk menempatkan konteks politik-ekonomi dan ekologi budaya sebagai faktor-faktor yang signifikan dalam proses dialektika masyarakat setempat, LSM, maupun pemerintah dalam membangun sistem perekonomian yang sesuai dalam konteks lokalitasnya masing-masing. Sebagaimana terlihat dari bentuk kebijakan yang berangkat dari kondisi geografis yang khas, kondisi pasar, respon masyarakat, maupun sebaliknya. Dengan demikian, kita tidak akan lagi terjebak pada penilaian tentang apakah neoliberalisme baik atau buruk, positif atau negatif.

## Daftar Pustaka

- Ahimsa Putra, Heddy Shri. (1994). Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya. *Masyarakat Indonesia* LIPI Jakarta Tahun XX, No. 4, 1994
- Anu Lounela. (2009). *Contesting forests and power; dispute, violence and negotiation in Central Java*. PhD. Research Series in Anthropology 17. Helsinki, Finland: University of Helsinki.”
- Bryant, Raimon L. dan Sinead Bailey. (1997). *Third Worlds Political Ecology*. London and New York: Routledge
- Forsyth, Timothy. (2003). *Critical political ideologi: the politics of environmental science*. London and New York: Routledge
- Grossman (1997). *The Political Ecology of Bananas: Contract Farming, Peasants, and Agrarian Change in Eastern Caribbean*. University of North Carolina Press.
- Hardesty, Donald L. (1977). *Ecological Anthropology*. Canada: John Wiley & Sons.
- Harvey, David. (2005) *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press: New York, 2005
- Hidayat, Herman, John Haba, & Robert Siburian (eds)/ (2011). *Politik Ekologi:*

- Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia
- International Year of Potato Roma. (2008). *New Light of Hidden Treasure*. diakses dari <http://www.potato2008.org/en/events/book.html> pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 11: 24 WIB
- Orlove, Benjamin S. (1980). *Ecological Anthropology* dalam *Annual Review of Anthropology*. IX, 235-37
- Ortner, Sherry. On Neoliberalism. Dalam <http://aotcpres.com/articles/neoliberalism/> diunduh pada tanggal 1 Maret 2013 pukul 20.59 WIB
- Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts . (1996). *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge.
- Potato in Highlands: Increasing profits and improving*, dalam <http://cipotato.org/research/potato-in-highlands> yang diunduh pada tanggal 28 februari 2013 pukul 13.29 WIB
- Pusat data dan informasi pertanian (2009) “Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian”. Volume 1 No. 1
- Santoso, Hery. 2004 “Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa. Yogyakarta: Damar
- Steger, Manfred B. (2006). *Globalisme, bangkitnya ideologi pasar* (Cet. 2). Manfred B. steger. Yogyakarta: Lafadl.
- Survey data potensi kawasan Dieng tahun. Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) tahun 2011
- Thorsen, Dag Einar dan Amund Lie. *What is neoliberalism?*. Department of Political Science University of Oslo. 2007. hal: 2, diunduh dari [folk.uio.no/.../What%20is%20Neo-Liberalism](http://folk.uio.no/.../What%20is%20Neo-Liberalism) pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.52 WIB
- <http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/referensi-hukum-indikasi-geografis> pada tanggal 10 april 2013 pukul 20:51
- PP (Peraturan Pemerintah) No. 51 tahun 2007 tentang Sertifikasi Indikasi Geografis “Pembuatan dan Carica”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2011/10/10/1709338/Pembuatan.Pembuatan.Pembuatan.-dan.Carica> Di akses 11 April 2013 pukul 15:20 WIB
- “Indikasi Terdaftar dan Alamat” diunduh di laman [http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan\\_ig\\_terdaftar.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan_ig_terdaftar.pdf)
- “Kasus Dieng Jaya, Penjualan Aset Diminta Seizin Tim”, dalam “<http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/15/ked10.htm>. Di akses 11 April 2013 pukul 15:17 WIB